

# DAMPAK PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Arif Maulana<sup>1</sup>, Aulya Maharani<sup>2</sup>, Mardiansyah Rasang<sup>3</sup>, Inka Nusamuda  
Pratama<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, University Muhammadiyah Mataram

[arif190222@gmail.com](mailto:arif190222@gmail.com)

---

**Keywords:**

Poverty;  
Welfare;  
Access to services

**Abstract:** *Urban poverty alleviation has become a major focus for many local governments, including Kabupaten Sumbawa Barat. The Urban Poverty Reduction Project in this region has been an implemented solution to improve community welfare. This study aims to evaluate the impact of P2KP on community welfare in Kabupaten Sumbawa Barat. The research method used is secondary data analysis with stakeholders related to this project. The results show that the Urban Poverty Reduction Project has had a significant positive impact on community welfare. The implementation of programs such as the provision of direct cash transfers, skills training, and urban infrastructure development has improved the community's access to health, education, and employment services. In addition, the active participation of the community in the program has also increased their sense of belonging and involvement in local development. In conclusion, the Urban Poverty Reduction project has made a significant contribution in improving the welfare of the people of West Sumbawa Regency. However, ongoing efforts are still needed to ensure the sustainability and continuity of this program in the long term.*

**Kata Kunci:**

Kemiskinan;  
Kesejahteraan; Akses  
layanan

**Abstrak:** Penanggulangan kemiskinan perkotaan telah menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sumbawa Barat. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di wilayah ini telah menjadi solusi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak P2KP terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dengan pemangku kepentingan terkait proyek ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Implementasi program-program seperti

---

pemberian bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur perkotaan telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini juga telah meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam pembangunan lokal. Kesimpulannya, proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program ini dalam jangka panjang.

---

**Article History:**

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024

This is an open access article under the **CC-BY-SA** license


---

## A. LATAR BELAKANG

Ketidakseimbangan ekonomi menjadi topik strategis dalam pelaksanaan suatu negara karena terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki arti penting terkait isu kemiskinan. Sepanjang sejarah manusia, kemiskinan selalu menjadi isu klasik yang rumit dan tampaknya selalu aktual di seluruh dunia. Pendapatan rendah sering dikaitkan dengan kemiskinan, tetapi masalah ini melibatkan banyak aspek lain, seperti pendidikan dan kesehatan. PBB mengatakan kemiskinan adalah ketika seseorang tidak memiliki pilihan atau kesempatan untuk meningkatkan kemampuan hidup mereka. Dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik sepanjang waktu. Selain hambatan struktural, institusional, dan sosial-budaya, kekurangan pendidikan, keterampilan teknologi, dan pengetahuan merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Gagal dianggap sebagai hasil dari mengabaikan masalah manusia dalam upaya mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan manusia, yang diukur bukan hanya dari Pendapatan Domestik Bruto tetapi juga dari harapan hidup dan pendidikan warganya, merupakan indikator penting dari kemajuan suatu negara. Karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup Indeks Pengetahuan sebagai salah satu indeks penting, pendidikan adalah modal dasar untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang memadai, pembangunan nasional diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan penerus dari Millenium Development Goals (MDGs), terdiri dari lima pilar: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. SDGs bertujuan untuk mencapai tiga tujuan penting pada tahun 2030: mengakhiri kemiskinan, mencapai keseimbangan ekonomi sosial, dan mencapai kesejahteraan manusia. (Setiawan & Jamaliah, 2023).

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia. Untuk alasan ini, kemiskinan harus menjadi prioritas utama pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk mengakhiri kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program. Ada dua pendekatan yang harus digunakan dalam upaya

mengakhiri kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka dapat mencegah kemiskinan baru muncul. "Miskin", yang berarti tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, adalah etimologi dari kata "kemiskinan". Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal mereka untuk hidup layak. Dalam istilah lain, kemiskinan adalah ketika seseorang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non-makanan. Garis ini juga dikenal sebagai "batas kemiskinan" atau "garis kemiskinan" (poverty treshold) (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang mendalam dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Negara ini memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai kemakmuran, tetapi sejumlah faktor kompleks terus menghambat kemajuan tersebut. Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu tempat yang melihat masalah ini. Meskipun Sumbawa memiliki sumber daya alam dan kekayaan budaya yang luar biasa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang mendalam dan berkelanjutan di negara ini. Nurulita et al., (2023). Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi masalah utama yang disebut kemiskinan. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Waspada, 2016) .

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang dasar 1945, dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan, pembangunan nasional sebagaimana digariskan undang-undang, merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional sebagaimana digariskan undang-undang adalah cara untuk mencapai tujuan kemiskinan. dalam meningkatkan aspek kehidupan bangsa, seperti pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan ideologi. Masyarakat yang mandiri dapat dibangun melalui pembangunan nasional. Kemiskinan bukan hanya masalah konsumsi atau ekonomi; itu juga masalah politik. Kemiskinan adalah masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan (Sentosa et al., 2024).

Pemerintah melakukan banyak hal untuk mengurangi kemiskinan yang melanda negara ini, salah satunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pastinya, program ini bertujuan untuk menghentikan kemiskinan, baik di kota maupun di pinggiran kota. Sejak beberapa tahun yang lalu, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) telah dimulai karena kesadaran bahwa kemiskinan adalah masalah yang mencakup berbagai aspek, termasuk aset, ekonomi, politik, dan sosial. Dibutuhkan prinsip yang jelas yang dipegang oleh pelaku P2KP dan lembaga masyarakat saat mengembangkan program kemiskinan (UNESCO, 2015).

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Industri (KI) di Nusa Tenggara Barat dengan produk unggulan sektor pertambangan. UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Batubara, telah mengamanatkan kepada setiap perusahaan tambang untuk mengolah bahan tambang di dalam negeri, yaitu dengan membangun Pabrik Industri Pertambangan (smelter). Pembangunan smelter dapat meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kesempatan

kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja atau SDM, dan mengembangkan perekonomian lokal secara keseluruhan. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT) adalah perusahaan yang memiliki badan hukum untuk mengelola pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat. Perusahaan ini telah menetapkan untuk membangun industri pertambangan (smelter) dengan menyiapkan lahan seluas kurang lebih 850 Ha untuk pembangunan industri turunannya. Aktivitas pertambangan ini dapat berdampak baik maupun buruk pada masyarakat desa selama pelaksanaannya (Umar et al., 2021).

## **B. METODE**

Tinjauan literatur adalah pendekatan sistematis untuk menemukan, menilai, dan menafsirkan semua temuan penelitian terkait dengan pertanyaan penelitian, subjek, atau bidang minat tertentu Kitchenham (2004). Studi individual mengacu pada proses melakukan penelitian asli, sedangkan tinjauan literatur melibatkan melakukan penelitian sekunder. Tinjauan literatur sangat berharga untuk mengkonsolidasikan temuan-temuan penelitian yang beragam dan relevan, sehingga memberikan penyajian informasi yang lebih komprehensif dan tidak memihak kepada para pembuat kebijakan (Oztemel and Gursev 2020).

literatur review dipakai untuk pengumpulan dan sintesis data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen, internet, dan perpustakaan. Sumber-sumber tersebut relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diselidiki Booth et al (2021). Pendekatan penelitian literatur mencakup serangkaian tugas yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta pengorganisasian bahan tulisan (Nursalam, 2016 2013).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Kab Sumbawa Barat**

Secara Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di bagian barat pulau Sumbawa, tepatnya antara 08° 29' dan 09° 07' Lintang Selatan dan antara 116° 42' - 117° 05' Bujur Timur. Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Selat Alas di sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Sumbawa di sebelah utara dan timur. Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02 Km', dengan ketinggian antara 0-1.730 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil, seluruhnya sudah bernama. Sebagian besar wilayah Sumbawa Barat (93.102 ha atau 50,53 persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan diatas 40%.

Morfologi wilayah Sumbawa bagian barat (Kabupaten Sumbawa Barat) terdiri atas beberapa satuan morfologi, yaitu pedataran yang meliputi 20%-30% kabupaten Sumbawa. Wilayah yang termasuk pada satuan morfologi pedataran ini diantaranya beberapa wilayah di pesisir pantai dan sekitar sungai besar dengan batuan-batuan penyusunnya adalah batuan kuarter sebagai hasil sedimentasi dari sungai dan pantai (aluvium). Sedangkan satuan morfologi perbukitan bergelombang-terjal mendominasi morfologi wilayah ini. Morfologi perbukitan ini tersusun oleh batuan-batuan gunungapi/produk vulkanik seperti lava, breksi, tuff, dan batuan lain adalah batu gamping terumbu hasil pengendapan laut.

Kabupaten Sumbawa Barat secara administratif terdiri dari 8 kecamatan, 58 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana rata-rata mengalami pertumbuhan 2,33% per tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Sumbawa Barat tahun 2020 tercatat 145.798 jiwa yang

terdiri atas 73.687 jiwa laki-laki dan 72.111 jiwa perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio mencapai 1,02 atau dengan kata lain setiap 100 orang perempuan terdapat 102 orang laki-laki.

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing - masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri, berdasarkan temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survai. Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Grafik 2. 13. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011-2020



Sumber data : BPS Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020

Jumlah penduduk miskin di Sumbawa Barat dalam kurun waktu 2011-2016 terus mengalami penurunan, kecuali pada kurun waktu 2014-2015. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 20.200 jiwa atau 13,34% dari jumlah penduduk pada bulan maret tahun 2020. Angka kemiskinan tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,85%. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar mengetahui berapa jumlah atau persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dari kemiskinan (P1). Kebijakan kemiskinan tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin saja, tetapi juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (P1) atau meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis/batas kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks kedalaman maka semakin lebar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

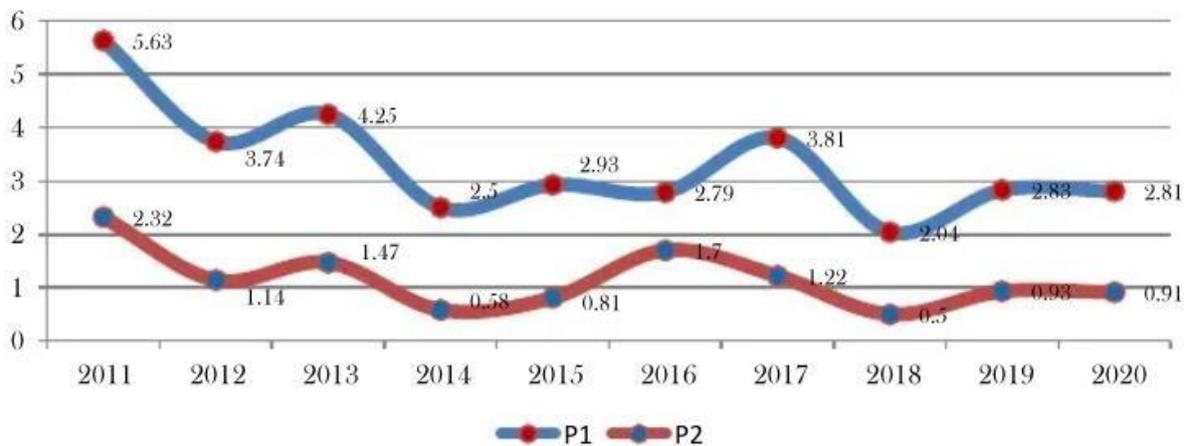
Dalam kurun waktu 2011-2016 terjadi fluktuasi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat. Terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan kesejahteraan penduduk miskin semakin memburuk atau dengan kata lain pengeluaran penduduk miskin bergerak menjauhi garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan dari penduduk miskin perlu dilihat. Gambaran Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat periode tahun 2011-2020 ditunjukkan seperti pada Grafik 2.14. Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebelumnya, fluktuasi juga terjadi di deret Indeks Keparahan Kemiskinan.

Pada kondisi terakhir, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dengan kenaikan angka Indeks Keparahan Kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin semakin meluas atau diantara penduduk miskin pengeluarannya bertambah ketimpangannya.

Grafik 2. 14. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2011-2020



Sumber data : BPS Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020

Kabupaten Sumbawa Barat, sebuah wilayah di Indonesia yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki sejumlah tantangan yang berkaitan dengan kemiskinan perkotaan. Meskipun terdapat potensi ekonomi yang signifikan, seperti sektor pariwisata dan pertanian, namun kurangnya lapangan kerja formal dan infrastruktur yang terbatas menyebabkan sebagian besar penduduk mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah meluncurkan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya lapangan kerja formal menyebabkan sebagian besar penduduk mengandalkan pekerjaan informal yang tidak menjamin penghasilan yang stabil dan layanan sosial yang memadai. Di samping itu, infrastruktur yang terbatas, seperti akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, dan jalan yang tidak terawat, juga menjadi masalah serius yang memengaruhi kualitas hidup penduduk perkotaan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah merumuskan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, layanan sosial dasar, dan infrastruktur yang diperlukan. Fokus utama dari proyek ini adalah memastikan bahwa masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Langkah-langkah konkret yang diambil dalam proyek ini meliputi pembangunan pusat pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal, peningkatan infrastruktur dasar seperti, pembangunan jaringan jalan yang lebih baik, penyediaan sistem air bersih yang terjangkau, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Dengan demikian, proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan bahwa proyek ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat perkotaan dalam jangka panjang.

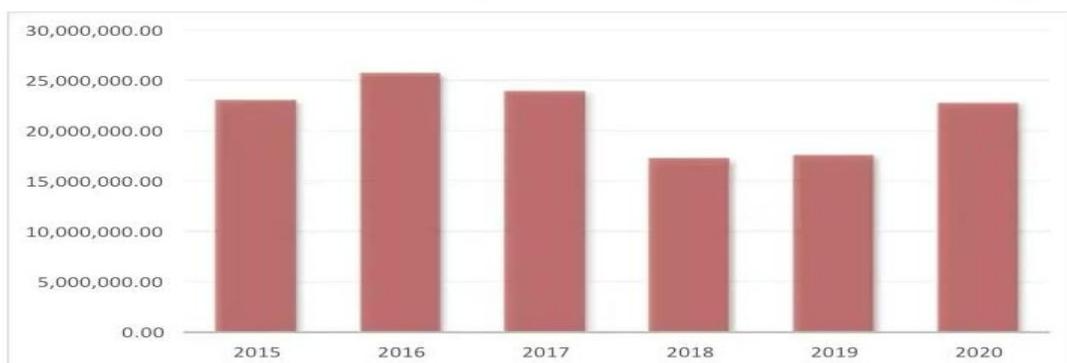
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Sumbawa Barat, seperti banyak wilayah di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan perkotaan. Faktor-faktor seperti kurangnya lapangan kerja, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta infrastruktur yang kurang memadai, telah menyebabkan tingkat kemiskinan yang signifikan di daerah ini. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah daerah telah meluncurkan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Fokus Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Proyek P2KP Kabupaten Sumbawa Barat difokuskan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan melalui beberapa pendekatan. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing kategori perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat digambarkan dengan melihat capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan baik atas dasar harga (ADH) berlaku tahun berjalan, maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Sumbawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp.22,76 triliun. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp.5,33 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp. 17,43 triliun.

Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi berbagai kategori lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp. 12,79 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 16,46 triliun pada tahun 2020. Dengan demikian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 28,78% pada tahun 2020.

Grafik 2. 5. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2020 (Rp. Jt)



Sumber data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Selain Product Domestic Regional Bruto, proyek ini juga mengutamakan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, Upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui program pelatihan keterampilan dan sanitasi. Langkah-langkah

konkret yang diambil mencakup pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan layanan publik yang terjangkau.

Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi merupakan langkah yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan perkotaan. Akses yang lebih baik terhadap layanan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, tindakan konkret yang diambil sangat penting, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan layanan publik yang terjangkau. Infrastruktur yang baik dan layanan publik yang mudah diakses dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang mungkin sebelumnya terpinggirkan atau memiliki layanan publik yang kurang.

### **PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomin dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada sumberdaya alam dan factor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 PDRB per kapita mencapai Rp. 187,722 juta per penduduk. Pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan PDRB per kapita dari Rp. 169,908 juta menjadi Rp. 117,277 juta. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan oleh penurunan ekspor konsentrat PT.AMNT. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB per kapita terjadi kenaikan yang tinggi mencapai Rp. 149,313 juta.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Fokus Fasilitas Infrastruktur Daerah Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitasekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkaptersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Jalan raya merupakan sarana transportasi yang paling vital. Panjang jalan di kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 tercatat sepanjang 484,90 km. Panjang jalan terdiri dari 69,82 km jalan negara, 76,39 km jalan provinsi, dan 338,69 Km jalan kabupaten. Menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan negara dan provinsi merupakan jalan aspal, namun jalan kabupaten sebagian besar merupakan jalan dengan permukaan gravels atau kerikil. Sedangkan menurut kondisinya, sebagian besar jalan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam kondisi baik.

Fokus Iklim Berinvestasi Pengembangan peluang investasi di Kabupaten Sumbawa Barat meliputi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan dan perikanan dan kelautan), pertambangan dan energi, dan infrastruktur. Peluang investasi prospektif yang menguntungkan juga sangat potensial untuk sektor pertambangan. Usaha-usaha

eksplorasi untuk menentukan cadangan sesuai dengan tingkatannya masih terus dilakukan. Mineral tambang yang sudah dieksploitasi meliputi emas dan tembaga. Peluang dan potensi investasi di Sumbawa Barat juga terbuka untuk sektor pariwisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan lingkungan.

Peluang pengembangan investasi pada sektor-sektor ekonomi yang potensial saat ini semakin terbuka dengan adanya forum tripartit yang dimotori oleh Bank Indonesia. Untuk mengembangkan komunikasi efektif dalam menghasilkan kesepakatan antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan pelaku usaha, khususnya dalam peningkatan dukungan lembaga perbankan untuk pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan data BPS tahun 2014 - 2018 memperlihatkan bahwa nilai investasi terus mengalami peningkatan, dimana data investasi tahun 2014 mencapai Rp.2,2 triliun mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi Rp. 7,98 triliun pada tahun 2018. Hal ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat.

Secara keseluruhan, proyek P2KP Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Dengan fokus pada berbagai aspek seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur, diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

### **Dampak P2KP**

Dampak proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat memang sangat signifikan dan beragam. Beberapa dampak utamanya meliputi:

**a. Penurunan Tingkat Pengangguran,**

Program pelatihan keterampilan dan proyek ini menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sumbawa Barat. Pelatihan keterampilan membantu masyarakat lokal menjadi lebih terampil dan membuat mereka lebih siap untuk bersaing di pasar kerja. Paradigma ekonomi masyarakat berubah dari sebelumnya bergantung pada sektor informal menjadi lebih beragam dan berkelanjutan sebagai hasilnya.

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 sebanyak 78.582, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebanyak 71.815. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada tahun 2020 mencapai 74.262 orang meningkat dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada tahun 2019 yang berada pada angka 67.848 orang. Sementara jumlah pengangguran mencapai 4.320 orang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 69,73% meningkat dibandingkan dengan TPAK tahun 2019.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki sebesar 85,41% sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebesar 84,88% atau meningkat sebesar 0,53%. Begitu juga TPAK untuk penduduk perempuan, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, yakni meningkat sebesar 0,85%. TPAK perempuan pada tahun 2020 tercatat sebesar 53,13% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 52,28%.

**b. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga**

Peningkatan lapangan kerja dan keterampilan yang diperoleh melalui program pelatihan keterampilan mengakibatkan peningkatan pendapatan rumah tangga secara

keseluruhan. Masyarakat kini memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil dan layak, yang membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan ini juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

**c. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan**

Proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan lebih banyaknya sumber daya yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini, masyarakat sekarang memiliki lebih banyak akses terhadap fasilitas dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini termasuk akses yang lebih baik terhadap pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan medis, dan pendidikan formal maupun non-formal. Dampak positif ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat secara keseluruhan.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki beberapa fasilitas kesehatan, salah satu diantaranya adalah rumah sakit. Sumbawa Barat hanya memiliki satu rumah sakit yaitu RSUD Asy-Syfa. Walaupun hanya memiliki satu rumah sakit saja, akan tetapi Sumbawa Barat juga memiliki fasilitas kesehatan penunjang lainnya seperti Puskesmas sebanyak 9 unit, dan Pukesmas Pembantu sebanyak 32 unit yang tersebar di semua wilayah kecamatan dan desa. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang tersedia harus dilengkapi dengan tenaga medis yang memadai. Fasilitas kesehatan di Sumbawa Barat sudah ditunjang oleh 52 dokter, 409 perawat, 355 bidan, dan 40 farmasi. Selain itu, ditunjang pula oleh tenaga non medis seperti ahli gizi (29 orang), teknisi medis (31 orang), sanitasi (22 orang), dan kesehatan masyarakat (28 orang). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 yang mencapai 148.606 jiwa, jumlah ini bisa dikatakan tidak ideal. Namun demikian, walaupun fasilitas kesehatan di kabupaten ini cukup terbatas, tetapi secara umum derajat kesehatan masyarakat cukup baik. Salah satu yang dapat menggambarkan hal tersebut adalah angka kesakitan.

Dengan demikian, dampak proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan sosial dan kualitas hidup yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

**D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil yang telah didapatkan oleh peneliti, yang sebelumnya sudah diuraikan, maka hal ini dapat disimpulkan:

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Program-program seperti bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini juga telah meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam pembangunan lokal. Data terbaru menunjukkan penurunan angka kemiskinan, mengindikasikan efektivitas program-program tersebut.

## Saran:

1. Keberlanjutan Program: Upaya berkelanjutan sangat penting untuk memastikan program ini berlangsung dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang cukup dan dukungan kebijakan yang kuat.
2. Kolaborasi Multi-sektoral: Untuk menangani kemiskinan dengan cara yang lebih efisien, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat.
3. Pemantauan dan Evaluasi: Untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program yang ada, penting untuk menggunakan data terbaru dan akurat untuk menilai kemajuan dan menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki atau disesuaikan.
4. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Pengembangan infrastruktur harus berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memungkinkan generasi mendatang memanfaatkannya.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan inklusif, serta melibatkan seluruh stakeholder, Kabupaten Sumbawa Barat dapat terus mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

The title for the thank you to the institution or the person who has contributed during the research and references is not numbered.

## REFERENSI

- Armoyu, H. M. (2013). Pemberdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 277–289.
- Nurulita, F., Kamaruddin, K., & Asmini, A. (2023). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 261–272. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1314>
- Sentosa, A., Lestario, W., & Junaidi, K. (2024). KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI *Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*. 6, 67–79.

- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(5), 399–405.  
<https://doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>
- Suhendi, S., & Astuti, I. P. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pdrb Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Ipm Di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1676–1694. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3212>
- Umar, Purwadinata, S., Suparman, & Supriadin. (2021). Kajian Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1*(No.2), 42–47.
- UNESCO. (2015). No Titleหลักการริหา. In *Universal Declaration of Human Rights*.
- Waspada, I. (2016). PENATAAN LINGKUNGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Suatu Studi Program P2KP di Kota Bandung). *Jurnal Geografi Gea*, 7(1).  
<https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1710>